



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Instruksi Presiden  
Nomor : 14 Tahun 2011  
Tanggal : 27 September 2011

### PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATAKELOLA

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN ? (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PENERINTAH DAERAH (6)
Konsolidasi struktur organisasi Kemendagri/Lembaga (K/L) dan BUMN	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi	Terwujudnya <i>roadmap</i> / Pedoman Umum Sistem Kebijakan Pemerintah	Tertinya 2 RPerpres dan 5 Perkkerjaan mengenai <i>Road Map</i> (pedoman umum) kebijakan pemerintah.	Kementerian Pembedayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	
		Tertaksamnya Reformasi Birokrasi di Kementerian/ Lembaga sesuai dengan <i>Grand Design</i> dan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi	Tercapainya 50 % pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian/ Lembaga		
		Tercapainya tingkat kualitas pelaksanaan KB yang terakur sesuai dengan kebijakan RB Nasional	Tercapainya 80% tingkat kualitas pelaksanaan KB yang terakur sesuai dengan kebijakan RB Nasional		

Penilaian ...

107



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 2 \*

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN 2	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PASERUNTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian Otonomi Daerah	Penyempurnaan Undang-Undang (UU) penyelenggaraan peminu dan pelaksanaan penyediaan kepala daerah	Disampulkannya rancangan pengganti UU No. 22/2007 tentang Penyelenggara Peminu, Inisiatif DPR	Tersampulkannya rancangan pengganti UU No. 22/2007 tentang Penyelenggara Peminu Inisiatif DPR, dimana DIMA meliputi : KPU, Lembaga Pengawas, Anggaran, peran pemerintah dan dewan kehoormatan penyelenggaraan peminu	Kementerian Dalam Negeri	

Dibahasnya ...

47



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

3

PROGRAM	TINDAKAN	KELUASAN 2)	SASARAN	INSTANSI/TANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan per-UT-an di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan	9000 perda yang dikaji, termasuk didalamnya perda terkait investasi dan perjanjian usaha	Terselesainya kajian atas 9000 perda dan mendapat rekomendasi tindak lanjut hasil kajian (disetujui, direvisi, dibatalkan) melalui perubahan tata cara ( <i>business process</i> ) pengharmonisasian perda, termasuk didalamnya perda terkait investasi dan perjanjian usaha serta percepatan penuntasan <i>backlog</i> perda periode sebelumnya	Kementerian Dalam Negeri	

Hasil ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

\* 4 \*

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUASAN 2 (3)	SASARAN (4)	INSTANSI/LENGKING JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
Penetapan dan pencapaian Sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah	Penetapan Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Jumlah kumulatif Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perhubungan yang ditetapkan	Tertentarisasinya dan tercapainya 30 % harmonisasi peraturan perundang-undangan sektor yang belian dengan peraturan perundang-undangan otonomi daerah di Pusat dan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	

Jumlah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN ? (3)	SASARAN (4)	INSTANSI/PISANGGUNG JAWAB (5)	PISABERHENTI DAERAH (6)
Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIADK)	Pembertian NIK kepada setiap penduduk	Jumlah kab./kota yang menerbitkan NIK Nasional kepada setiap penduduk	Tertetapkannya 10 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah	Kementerian Dalam Negeri	Seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
	Pemberian e-KTP berbasis NIK	Jumlah penduduk yang menerbitkan e-KTP berbasis NIK Nasional	Tertuhnya NIK Nasional untuk setiap penduduk di 497 kab./kota	Kementerian Dalam Negeri	Seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peningkatan ...

407



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 6 \*

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUASAN 2) (3)	SASARAN (4)	INSTANSI/PANGKALAN JAWAB (5)	PELAKSANA/PALAKSI (6)
Peringkasan Kapasitas Keuangan Kementerian Daerah	Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan	Tersusunnya kebijakan/ regulasi di bidang fasilitasi dana perimbangan	Tertinya 2 Peraturan Menteri yang menfasilitasi dana perimbangan	Kementerian Dalam Negeri	
Implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik	Implementasi dan perubahan peraturan pelaksanaan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik	Tertinya PP dan sosialisasi peraturan yang menjadi landasan hukum operasionalisasi UU No. 25/2009 pada K/L dan pemerintah daerah	Tertinya PP tentang Pelaksanaan UU tentang Pelayanan Publik	Kementerian Pembinaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	
			1) Tercapainya sosialisasi pada seluruh K/L; 2) Tercapainya sosialisasi pada 50% provinsi; 3) Terlaksananya implementasi 20% K/L; 4) Terlaksananya implementasi 20% Penda	Kementerian Pembinaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	

Pelaksanaan ...

17



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN 2	SASARAN	INSTANSI/TANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian PAN & RB	Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas K/L yang menaungi aparatur negara yaitu Kementerian PAN RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN)	Tercapainya penyempurnaan Tupoksi dan struktur Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan terciptanya tata hubungan kerja yang lebih efektif dan efisien antara Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN)	1) Terbinya kebijakan/peraturan mengenai Tupoksi dan Struktur organisasi Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang efektif, efisien dan synergis 2) Terbinya Per. Men. PAN - RB mengenai tata hubungan kerja antara Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN)	Kementerian Penerimaan dan Reformasi Birokrasi	

Implementasi ...

107



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

\* 8 \*

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN ? (3)	SASARAN (4)	INSTANSI/TUANGKONG JAWAB (5)	PASIBRINTAH/DIAKUI (6)
Implementasi UU No. 14/2008 mengenai Ketersediaan Informasi Publik	Revisi UU No.14 Tahun 2008 tentang Ketersediaan Informasi Publik	Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Terbentuknya tim/bahak Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 15 Lingkungan Kementerian Tingkat Pusat	Kementerian Komunikasi dan Informasi	Seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota
		Bimbingan Teknis tentang Teknik Administrasi Bidang Ketersediaan Informasi	Terlaksananya Bimbingan Teknis tentang Teknik Administrasi Bidang Ketersediaan Informasi di 15 Provinsi	Kementerian Komunikasi dan Informasi	Seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota
		Bimbingan Teknis tentang Budaya Dokumentasi	Terlaksananya Bimbingan Teknis tentang Budaya Dokumentasi di 15 Provinsi	Kementerian Komunikasi dan Informasi	Seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota

PRIORITAS 2...

47



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

9

## PRIORITAS 2: PENDIDIKAN

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KOLABORASI (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
Peningkatan akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi	Peningkatan sistem manajemen BOS	Tersusun dan terajuknya sistem manajemen pengaliran BOS melalui transfer daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi BOS 2011 per triwulan	Kementerian Pendidikan Nasional	Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota
		Tersusun dan terajuknya sistem manajemen BOS madrasah berdasarkan evaluasi pelaksanaan 2010	Terselenggaranya konsep (PP/Kepres) pengaliran dana BOS berdasarkan evaluasi triwulan II	Kementerian Agama	Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi

Penyediaan ...



REPUBLIK INDONESIA  
PRESIDEN

- 10 -

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	MELAKUKAN (3)	SASARAN (4)	INSTANSI/TUANG/TUNG JAWAB (5)	PENERIMA/TUANG (6)
	Penyediaan buku ajar yang bermutu dan menarik melalui pembelian hak cipta	Makin tinggajumlahnya buku ajar yang menarik dan bermutu bagi siswa dari seluruh kalangan ekonomi	Tercapainya 100% (300 judul) buku teks pelajaran SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan SMK yang telah dibeli hak ciptanya	Kementerian Pendidikan Nasional	Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi
	Penyuluhan beasiswa bagi murid-murid yang berprestasi	Tersulturnya beasiswa prestasi bagi murid SMP	Tersulturnya beasiswa prestasi kepada 50.500 murid SMP dengan tepat waktu dan tepat jumlah paling lambat Desember 2011	Kementerian Agama	Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi
		Tersulturnya beasiswa prestasi kepada 1000 murid MTS	Tersulturnya beasiswa prestasi kepada 1000 murid MTS dengan tepat waktu dan tepat jumlah paling lambat Desember 2011		

Rehabilitasi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 11 -

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUAIAN ? (3)	SASARAN (4)	INSTANSI/PENANGGUNG JAWAB (5)	DIAMERINTAH/DIURAI (6)
	Rehabilitasi gedung sekolah	Terselenggaranya rehabilitasi pada 3.030 ruang kelas dari total gedung sekolah yang rusak	Terehabilasinya 1.325 ruang kelas MI	Kementerian Agama	Seluruh Pemerintahan Kabupaten/Kota
			Terehabilasinya 1.705 ruang kelas MTs	Kementerian Agama	Seluruh Pemerintahan Kabupaten/Kota
	Regulasi pemerataan distribusi guru	Tersusun dan terapkannya sistem manajemen penyaluran DAK melalui transfer daerah	Dihertanungannya laporan DAK dari 445 Kabupaten/Kota	Kementerian Pendidikan Nasional	Seluruh Pemerintahan Kabupaten/Kota
		Tersedianya guru bagi seluruh jenjang pendidikan	Tertahinya SEP yang didukung adanya pemerataan guru di dalam satu provinsi	Kementerian Pendidikan Nasional	

Tersedianya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
12

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELIVARAN ? (3)	SASARAN (4)	INSTANSI/PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
Perbaikan status gizi anak sekolah	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMATAS) di daerah tertinggal, terpenchi, perbatasan, dan kepulauan	Jumlah siswa TK dan SD di daerah tertinggal, terpenchi, perbatasan teristisikn, dan keputuasan yang memperoleh PMATAS untuk penugangan gizi	Tercapainya 1.200.000 siswa TK dan SD di daerah tertinggal, terpenchi, perbatasan teristisikn, dan keputuasan yang menerima PMATAS secara teratur	Kementerian Agama	Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota
		Jumlah siswa RA dan MI di daerah tertinggal, terpenchi, perbatasan, dan keputuasan yang memperoleh PMATAS untuk penugangan gizi	Tercapainya 180.000 siswa RA dan MI di daerah tertinggal, terpenchi, perbatasan, dan keputuasan yang menerima PMATAS secara teratur	Kementerian Agama	Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengertian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 13 -

PROGRAM	TINDAKAN	KUANTIFAN ?	SASARAN	INSTANSI/PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH/DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penggunaan metodologi dan kurikulum	Penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa	Implementasi uji coba kurikulum dan metode pembelajaran aktif	Tercapainya 100% pelaksanaan uji coba kurikulum di 250 satuan pendidikan; diterimanya revisi/masukan/perbaikan sehingga kurikulum siap untuk mulai diimplementasikan secara luas	Kementerian Pendidikan Nasional	Seluruh Pemerintahan Kabupaten/Kota
Penggunaan pergesahan sekolah	Pembelajaran dan pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan melalui program pelatihan profesional yang berkesinambungan	Persentase Kepala Sekolah SMP, SMA/SMK dan Guru yang sudah mengikuti pelatihan yang berhasil pada hal yang bersifat praktis	Tercapainya 7,80 % (20.050 kepala sekolah dan pengawas) dari seluruh tenaga kependidikan di tingkat SMP dan SMA/SMK yang sudah mengikuti program pelatihan profesional yang berkesinambungan paling lambat bulan Desember 2011 (7,80% untuk tiap tingkatan pendidikan)	Kementerian Pendidikan Nasional	Seluruh Pemerintahan Kabupaten/Kota

Persentase....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 14 -

PROGRAM	TINDAKAN	KUANTIFIKASI	SASARAN	INSTANSI/PETANGGUNGJAWAB	PLAERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pencapaian sertifikasi guru dalam jabatan	Persentase guru TK/SD, SMF, SMA/SMK dan Pengawas yang lulus sertifikasi guru	Tercapainya 14.265 Kepala madrasah terdiri dari 8.260 Kepala RA/MI, 2.660 Kepala MTs, 1.130 Kepala MA, dan 2.215 pengawas madrasah yang sudah mengikuti program pelatihan peningkatan kompetensi yang berkesinambungan paling lambat bulan Desember 2011	Kementerian Agama	Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota
			Tercapainya 100% (300.000 guru dan pengawas) di tingkat TK/SD SMF, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti program sertifikasi paling lambat bulan Desember 2011	Kementerian Pendidikan Nasional	

Pengertian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
15

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KUANTIFIKASI (3)	SASARAN (4)	INSTANSI/PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH/PATRAH (6)
Pengukuran pendidikan agama	Penyusunan Standar Nasional Pendidikan bagi pendidikan agama dan keagamaan	Sosialisasi Standar Nasional Pendidikan bagi pendidikan agama dan keagamaan	1) Tersosialisasinya Standar Nasional Pendidikan Agama dan Keagamaan yang telah disusun pada tahun 2010 pada 100% Kantor Kementerian Kab/Kota, paling lambat Desember 2011 2) Tersusunnya laporan pelaksanaan sosialisasi dan persiapan implementasi tahun 2011 dan rekomendasi tindak lanjut untuk tahun 2012	Kementerian Agama	Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota
Pengukuran kualitas perguruan dan layanan pendidikan	Pengukuran Kejelasan Pendidikan dengan Dana Usaha melalui Pendidikan Kewirausahaan di SMK dan PT	Jumlah SMK dan PT yang telah mengembangkan pendidikan berbasis entrepreneurship serta pelaksanaan uji coba	Tercapainya 50 PT dan 200 SMK yang telah mengembangkan pendidikan berbasis entrepreneurship, paling lambat Desember 2011	Kementerian Pendidikan Nasional	

Penerapan ...

107



PRAEDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
16

PROGRAM	TINDAKAN	KUANTIF	SIKAP	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH/LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penerapan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di sekolah	Persentase atau jumlah pendidikan jenjang SMP dan SMA yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	Tercapainya 50% dari seluruh satuan pendidikan jenjang SMP dan 60% dari seluruh satuan pendidikan jenjang SMA yang telah menerapkan pembelajaran berbasis TIK, paling lambat Desember 2011	Kementerian Pendidikan Nasional	Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota
	Pemertanian dan pemberian insentif serta dukungan bagi siswa berbakat peserta olimpiade ilmiah internasional dan kompetisi internasional lainnya	Jumlah siswa berbakat (baik peserta olimpiade internasional dan kompetisi tingkat tinggi lainnya) yang telah mendapat insentif dan dukungan dari pemerintah	Tercapainya 90 peserta olimpiade ilmiah internasional dan kompetisi internasional yang telah mendapat insentif dan dukungan dari pemerintah	Kementerian Pendidikan Nasional	Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota

PRIORITAS 3 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
17

### PRIORITAS 3: KESEHATAN

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN 2	SASARAN	INSTANSI/PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pedukungan Uyaya Kesehatan Pewasit Terpadu	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Keperilaku	Semakin tingginya persentase ibu bersalin yang dilindungi oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (PTN))	Tercapainya 86% ibu bersalin yang dilindungi oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (PTN))	Kementerian Kesehatan	
		Semakin tingginya persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke emgatal (K40))	Tercapainya 88% ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke emgatal (K40))	Kementerian Kesehatan	
		Semakin tingginya persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar	Tercapainya 40% fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar	Kementerian Kesehatan	

Pembinaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 18 -

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN 1	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DAFTARINSTRUMEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	Semakin besarnya cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)	Tercapainya 86% cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)	Kementerian Kesehatan	
		Semakin besarnya cakupan pelayanan kesehatan bayi	Tercapainya 85% cakupan pelayanan kesehatan bayi	Kementerian Kesehatan	
		Semakin besarnya cakupan pelayanan kesehatan balita	Tercapainya 80% cakupan pelayanan kesehatan balita	Kementerian Kesehatan	
	Pembinaan Imunisasi dan Karantina Kesehatan	Semakin tingginya presentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Tercapainya 82% bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Kementerian Kesehatan	

Pengembangan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
19

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KUALIFIKASI (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	TANGGUNG JAWAB (6)
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan	Semakin banyaknya jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tercapainya 8,628 puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Kementerian Kesehatan	
	Peningkatan Penyehatan Lingkungan	Semakin besarnya persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat	Tercapainya 90% kualitas air minum yang memenuhi syarat	Kementerian Kesehatan	
	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Semakin tingginya angka keberhasilan pengobatan TB	Tercapainya 86% angka keberhasilan pengobatan	Kementerian Kesehatan	

Persentase ...

17



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 20 -

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN (*)	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Upaya peningkatan pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-24 tahun	Tercapainya jumlah Kabupaten/kota yang sudah melakukan upaya peningkatan pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-24 tahun sebesar 200 kab/kota, yang dilengkapi rapid survey untuk melihat dampak upaya tersebut secara acak di beberapa kab/kota	Kementerian Kesehatan	
Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian	Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri	Tercapainya jumlah 15 bahan baku obat dan obat tradisional yang diproduksi di dalam negeri	Kementerian Kesehatan	

Pengembangan ...



PAREIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 21 -

PROGRAM	TINDAKAN	KUALIFIKASI	SASARAN	INSTANSI/PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1) Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan	(2) Standarisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan berkelanjutan SDM Kesehatan	(3) Memungkinkannya jumlah SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjukkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan	(4) Terlaksananya pendidikan berkelanjutan bagi 8000 SDM kesehatan melalui pendidikan berkelanjutan	(5) Kementerian Kesehatan	(6)
Pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	Peraturan ketenagakerjaan Jaminan Sosial Nasional	Semakin meningkatnya persentase profesi tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi	Tercapainya 55% profesi tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi	Kementerian Kesehatan	
		Terwujudnya RUTU BPJS versi Pemerintah	Terlaksananya perbaikan RUTU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan DPR		

Penyediaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
22

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN 1)	SASARAN	INSTANSI/TANGGUNG JAWAB	PLAERINTAU/DALAKAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyediaan obat esensial nasional	Penyediaan obat ketereediaan obat publik dan perbaikan kesehatan	Memungkinkan persentase ketereediaan obat dan vaksin yang aman, bermutu dan berkualitas	Tercapainya 85% ketereediaan obat dan vaksin yang aman bermutu dan berkualitas	Kementerian Kesehatan	
Pembiayaan Upaya Kesehatan	Pembiayaan Upaya Kesehatan Rujukan	Semakin banyaknya jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia ( <i>world class</i> )	Tercapainya 2 kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia ( <i>world class</i> )	Kementerian Kesehatan	
		Semakin meningkatnya persentase RS Pemerintah menyelenggarakan pelayanan rujukan bagi Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA)	Tercapainya 70% RS Pemerintah menyelenggarakan pelayanan rujukan bagi Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA)	Kementerian Kesehatan	

Revisi/Isasi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
23

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>1)</sup>	SASARAN	INSTANSI/PISANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1) Revisi/Isi Program Keluarga Berencana	(2) Peningkatan intensitas pelayanan dan promosi program KB secara nasional	(3) Semakin meningkatnya partisipasi peserta KB Baru MKIP	(4) Tercapainya 12,5% peserta KB Baru MKIP dari 7,2 juta peserta KB Baru	(5) Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	(6)
		Meningkatnya partisipasi peserta KB Baru Pria	Tercapainya 4% peserta KB Baru Pria dari 7,2 juta peserta KB Baru	Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	

PRIORITAS 4 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 92 \*

### PRIORITAS 10- DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR DAN PASCA KONFLIK

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN <sup>*)</sup> (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk di daerah tertinggal, terluar, dan pasca konflik	Pelaksanaan pembangunan dan pemertanian pembangunan sarana dan prasarana informasi	Desa Ibukota Kecamatan di wilayah USO terlayani dengan sarana internet	Disperasabahnya Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIKO) di 5.748 lokasi	Kementerian Komunikasi dan Informasi	Pemerintah Daerah Provinsi terkait
		Jumlah Buskota Provinsi yang memiliki internet exchange KPL/USO	Disperasabahnya Nusantara Internet Exchange (NIX) KPL/USO di 8 kota		
		International Internet Exchange (IIX) di 4 Ibukota provinsi	Terselesainya regulasi terkait penggunaan International Internet Exchange (IIX) dan penggunaan IIX di 4 kota		

Desa ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 93 -

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN 1	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Desa Informasi yang dilengkapi dengan radio komunitas	Dimalahkannya jalur pembangunan Desa Informasi tahun 2011 di 60 lokasi		
	Peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di daerah tertinggal, terdapat, tertinggal, dan pasca konflik	Tercadanya pendidik dan tenaga pendidikan yang menerima tunjangan khusus	Diterimanya tunjangan khusus pada 44.000 orang pendidik dan tenaga pendidikan pada Desember 2011	Kementerian Pendidikan Nasional	Pemerintah Daerah terkait
		Tercadanya guru madrasah penerima tunjangan khusus	Diterimanya tunjangan khusus oleh 3.500 guru madrasah pada Desember 2011	Kementerian Agama	Pemerintah Daerah terkait

Peningkatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 94 -

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN ? (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
	Peningkatan koordinasi/kementerian/ lembaga dalam pencapaian pembangunan daerah tertinggal	Menginkatkan koordinasi lintas sektor dan tersusunnya acuan perencanaan, penganggaran pencapaian pembangunan daerah tertinggal	Tersusunnya review Strategi Nasional Pencapaian Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PTD) 2010-2014 dan Tersusunnya Rencana Aksi Nasional Pencapaian Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PTD) 2012	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait
			Tertafuilansinya 70 kabupaten tertinggal dalam revitalisasi Strategi Daerah Pencapaian Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PTD) 2010-2014	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait

Meningkatnya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 95 -

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUAMAN *) (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
		Memangkatnya Kabupaten Tertinggal yang memperoleh fasilitasi melalui pelaksanaan Tugas Pemerintahan dan Bansos	Tertaksmanya fasilitas kegiatan tugas pemerintahan di 1 Propinsi dan 3 kabupaten serta bansos di 150 Kabupaten	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait
			Tertaksmanya fasilitas pengembangan produk unggulan kabupaten di 50 kabupaten	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait
			Tertaksmanya fasilitas pembangunan kawasan perdesaan terpadu di 12 kabupaten	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait

Penyelenggaraan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 96 -

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN <sup>9)</sup> (3)	SASARAN (4)	INSTANSI/TANGGUNG JAWAB (5)	PISAPRINTAH/DAERAH (6)
	Pengembangan perhubungan di daerah tertinggal	Peningkatan akses daerah tertinggal	Tersedianya 61 rute perintis (laut) pada Desember 2011	Kementerian Perhubungan	Pemerintah Daerah terkait
			Tersedianya 4 (empat) unit kapal perintis (tandem) atas 3 unit tipe 1200 GT dan 1 unit kapal perintis 500 DWT	Kementerian Perhubungan	Pemerintah Daerah terkait
			Beroperasinya 157 lintas bus perintis pada Desember 2011	Kementerian Perhubungan	Pemerintah Daerah terkait
			Tersedianya 48 bus perintis pada Desember 2011	Kementerian Perhubungan	Pemerintah Daerah terkait

Tersedianya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 97 \*

PROGRAM (1)	TINDAKS (2)	KELUARAN 9 (3)	SASAKAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
		Inventarisasi kebutuhan pembeuaan rate perintis baru	Tersedianya 131 rate perintis (udara) pada Desember 2011	Kementerian Perhubungan	Pemerintah Daerah terkait
		Evaluasi pemberian subsidi atas rate perintis	Tersedianya 26 sarana SDP yang terdiri dari: 1) Tersedianya 9 (sembilan) kapal penyeberangan perintis tahap selasi; 2) Dibangunnya 17 (tujuh belas) kapal penyeberangan perintis tahap lanjutan	Kementerian Perhubungan	Pemerintah Daerah terkait
		Evaluasi pemberian subsidi atas rate perintis	Tersedianya dokumen hasil evaluasi pemberian subsidi atas rate perintis selama 2 tahun	Kementerian Perhubungan	Pemerintah Daerah terkait

Peningkatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 98 \*

PROGRAM	TINDAKAN	KUALIFIKASI	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peningkatan kemudahan welayah NKEI	Pelaksanaan perundingan perbatasan RI- Malaysia, Singapura, Timor Leste, Filipina, Vietnam, dan Palau	Tercapainya kesepakatan dalam rangka perundingan perbatasan	Tercapainya kesepakatan teknis antar negara: 1) Batas laut wilayah dengan 2 negara 2) Batas darat wilayah dengan 2 negara 3) ZEE dengan 4 negara 4) Landas kontinen dengan 3 negara	Kementerian Perhubungan Daerah Terhinggaal	Pemerintah Daerah terkait
	Pendayagunaan pulang-pulau kecil	Identifikasi dan peta potensi pulang kecil bagi pengembangan dan pembangunan selanjutnya	Teridentifikasi dan terpublikasinya potensi 30 pulang kecil termasuk pulang kecil terluar	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemerintah Daerah terkait

Pulang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 99 \*

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KUALIFIKASI (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
	Fasilitasi perguruan berkegiatan wilayah perbatasan antar negara	Tersusunnya 1 (satu) dokumen rencana aksi pembangunan batas wilayah dan kawasan perbatasan tahun 2012	Tercapainya fasilitas pembangunan infrastruktur 30 pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang memadai secara terintegrasi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemerintah Daerah terkait
			Dibentuknya rencana aksi pembangunan batas wilayah dan kawasan perbatasan tahun 2012 di 24 kabupaten/kota dan 39 kecamatan lokasi prioritas antara K/L dengan Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Rencana Induk Perbatasan 2011- 2014	Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)	

Koordinasi...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
\* 100 \*

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN 9 (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
	Koordinasi penyelenggaraan infrastruktur perbatasan untuk mengatasi ketertinggalan wilayah	Sinkronisasi program pembangunan infrastruktur untuk membuka ketersediaan lokasi-lokasi kecamatan prioritas kawasan perbatasan	Terwujudnya 1 (satu) dokumen rencana aksi pembangunan infrastruktur untuk mengatasi ketertinggalan lokasi prioritas kawasan perbatasan yang diupayakan oleh Kementerian/lembaga dan daerah	Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPPP)	
	Inventarisasi Pulau-Pulau Kecil Terluar di pusat	Tersedianya Data dan Informasi Perbatasan Pulau Kecil Terluar (WP3WPT di pusat)	Tersedianya Data Digital Pulau Kecil Terluar sebanyak 21 pulau-pulau kecil	Badan Perencanaan Nasional (BPN)	

  
Pelayanan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 101 -

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN/9 (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PAPERINTAH DAERAH (6)
Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik	Pembinaan upaya kesehatan dasar dan kesehatan rujukan	Peningkatan pelayanan kesehatan RS bergerak terutama di kabupaten/kota di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK)	Tercapainya 81 puskesmas yang menjadi pusat rujukan perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar	Kementerian Kesehatan	
Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi	Terbangunnya sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi Daerah Tertinggal dan Perbatasan	Tersedianya 10 rumah sakit bergerak di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK)	Kementerian Kesehatan dan Transmigrasi	Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait

Tertindakannya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 102 -

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KILLIMAN 7 (3)	SASAKAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
		Terlaksananya peningkatan/rehabilitasi sarana prasarana di kawasan transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan	Tercapainya peningkatan fungsi sarana dan prasarana mendukung aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan sepanjang 70,76 km di 48 lokasi pada 41 Kab.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait
		Terselenggaranya serah terima UFT ke Pemda	Terbangunnya fasilitas energi terbarukan di daerah tertinggal di 10 lokasi pada 2 Kab.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait
			Terselenggaranya proses UFT siap serah di daerah tertinggal, perbatasan dan strategis sejak tahun ini pada 75 UFT di 33 Kab.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 103 \*

**PRIORITAS 1 : KEBUDAYAAN, KREATIVITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI**

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN 2 (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
Program Keajaiban, Keputihakalan, dan Permusuman	Pengembangan pengelolaan peninggalan keputihakalan	Meningkatnya kualitas pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta Pengelolaan Cagar Budaya secara terpadu	1. Terwujudnya pengelolaan terpadu Kawasan Candi Rebohudari; 2. Terwujudnya Kesepakatan Pengelolaan Terpadu Kawasan Candi Prambanan; 3. Terbentuknya model pengelolaan terpadu Situs Manusia Purba Sangiran	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata JAWAB	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten/Kota terkait
	Pengembangan pengelolaan permusuman	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan museum, termasuk museum daerah, dengan merevitalisasi museum	Terlaksananya revitalisasi 30 Museum	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	Pemerintah Daerah terkait

Peningkatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 104 \*

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KUALIFIKASI (3)	SASARAN (4)	INSTANSI/PENANGGUNG JAWAB (5)	PISAPERINTAH DAERAH (6)
Peningkatan kemampuan IPTEK untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional	Peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda	Meningkatkan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda	Terlaksananya kegiatan <i>Leistungszentrum</i> oleh 10 (sepuluh) kelompok pemuda	Kementerian Riset dan Teknologi	
	Peningkatan hibung ippek unggul di bidang kesehatan, obat-obatan dan instrumentasi medis	Meningkatkan kemampuan inovasi nasional bidang kesehatan dan obat	Terlaksananya hasil dari 5 (lima) paket penelitian untuk meningkatkan ippek unggul di bidang kesehatan dan obat	Kementerian Riset dan Teknologi	

PRIORITAS 12 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 103 \*

**PRIORITAS 12: PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN <sup>2)</sup> (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
Pengamanan SNKI dan penyusulangan tindak terorisme	Pencegahan Tindak Pidana Terorisme	Tercapainya peningkatan jumlah penyelesaian pengamanan perkara terorisme	Tercapainya 100% <i>Crime Clearance</i> tindak pidana terorisme tingkat nasional	Kepolisian Republik Indonesia	
Pencegahan dan pemberantasan korupsi	Pencegahan Penyelesaian dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	Jumlah penyelesaian dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	Tertuntaskannya penyelesaian dan penyidikan atas 100 perkara tindak pidana korupsi dengan nilai korupsi minimal Rp. 500 juta	Kejaksaan Agung	
	Pencegahan Pra Penuntutan dan Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan	Tertuntaskannya pra penuntutan dan penuntutan atas 100 perkara tindak pidana korupsi dengan nilai korupsi minimal Rp 500 juta	Kejaksaan Agung	

Pemangaman ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 106 -

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KETILAKAAN ? (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
	Peningkatan Perkaratan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan, Kegari dan Cabjari	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang dicegahkan oleh Kejaksaan, Kegari, dan Cabjari	Tercapainya 1.445 perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan, Kegari, dan Cabjari	Kegiksaan Agung	
Peningkatan sarana dan prasarana kembanga peradilan	Pengembangan Lembaga Penyisrakan (Lapas)	Jumlah pembangunan Lapas/Rutan baru	Tercapainya 500 perkara tindak pidana Khusus oleh Kejaksaan, Kegari, dan Cabjari	Kegiksaan Agung	
		Jumlah pembangunan Lapas/Rutan lanjutan	Tercapainya konstruksi 13 Lapas/Rutan baru	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
			Tercapainya konstruksi 26 Lapas/Rutan lanjutan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	

107



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 107 -

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KUALIFIKASI (3)	SASARAN (4)	INSTANSI/PETANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
Peningkatan kemampuan pelayanan pemerintahan kotamadya	Pergaduan aliansi hasil industri dalam negeri	Meningkatnya produksi Aliansi Industri dalam negeri	Terserahkannya Hasil Produksi Aliansi Dalam Negeri (Pinjaman Dalam Negeri) secara tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu	Kementerian Pertahanan	
	Pergaduan Alut/Almatsus Polri produksi dalam negeri	Meningkatnya kemandirian Alut/Almatsus Polri produksi dalam negeri	Terserahkannya Alut/Almatsus Polri produk industri dalam negeri yang memenuhi standar keamanan internasional	Kepolisian Republik Indonesia	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 108 \*

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN ? (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
	Pengujian dan Penerapan Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan	Pengembangan prototipe sistem PUNA tipe jarak jauh dengan teknologi control & command (TCC)	Terselenggaranya 2 buah prototipe PUNA Alap-Alap	Badan Pusat Pengujian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	
			Terselenggaranya produksi 1 unit PUNA Seri yang diproduksi mitra industri	Badan Pusat Pengujian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	
Penggunaan perbandingan HAM	Percapaian pelaksanaan RAN HAM	100% pelaksanaan RAN HAM untuk Tahun 2011	Tertelaksananya percapaian implementasi RAN HAM	Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan	
Pengembalian Aset (Asset Recovery)	Peningkatan pengembalian aset akibat tindak pidana korupsi	Jumlah kerja sama hukum sebagai implementasi Mutual Legal Assistance (MLA) dalam rangka pengembalian terdakwa/tersangka dan aset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembuyahkan di luar negeri	Tersusunnya jumlah permintaan MLA terkait tindak pidana korupsi yang telah berhasil disampaikan ke negara lain	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	

PRIORITAS 13 ...

107



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 109 \*

### PRIORITAS 13: PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG PEREKONOMIAN

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KETILIPAN? (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
Pengembangan industri nasional	Pengembangan Kluster Industri Hilir Kelapa Sawit	Penetapan Kawasan Industri Hilir Kelapa Sawit di Sumatera Utara	Terdirikanya Kawasan Industri Hilir Kelapa Sawit di Sei Mangket	Kementerian Perindustrian	Pemerintah Daerah terkait
		Promosi investasi Industri Hilir Kelapa Sawit (IHKS) di dalam dan luar negeri	Terdikanya kegiatan promosi IHKS di 4 (empat) negara dan 2 (dua) Provinsi	Kementerian Perindustrian	Pemerintah Daerah terkait
		Tercapainya pembangunan 1 unit Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBS) limbah kelapa sawit	Terdikanya kemajuan pembangunan 1 unit Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa limbah kelapa sawit	Kementerian Perindustrian	Pemerintah Daerah Terkait

Peningkatan ...

107



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 110 -

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUAMAN ? (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
Peningkatan pelayanan dan perlindungan TKI	Penyempurnaan UU No. 39/2004	Disempurnakannya rancangan Peraturan UU No. 39/2004 Keppda DPR	Tersempurnakannya rancangan Peraturan UU No. 39/2004 Keppda DPR	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pemerintah Daerah terkait
	Peningkatan masalah TKI melalui pembangunan sistem layanan perdagangan (online)	Tersedianya sistem layanan perdagangan TKI	Tersedianya sistem layanan perdagangan TKI yang telah teruji coba di Kantor Pusat dan 10 BPSTKI	Badan Nasional Penyelidikan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)	Pemerintah Daerah terkait

Pengamanan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- III -

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KUALIFIKASI (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
	Pergumaman keberangkatan untuk mencegah keberangkatan TKI non procedural	Memilikinya presentase TKI yang memiliki dokumen resmi bekerja ke luar negeri	Tercapainya 100% pemberangkatan TKI berdasarkan resmi dan pembekalan bagi 750 TKI ilegal untuk berangkat dengan berdasarkan resmi	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)	
	Ases bantuan hukum terhadap TKI bermasalah di luar negeri	Pembertian bantuan hukum (advokasi dan lawyer) bagi WNI terutama tenaga kerja wanita	Tercapainya 29,17% pemberian bantuan hukum (advokasi dan lawyer) bagi WNI terutama tenaga kerja wanita	Kementerian Luar Negeri	
	Peraturan layanan dokumen TKI dengan menggabungkan SIM TKI bertagu K/L	Selesaiyanya desain arsitektur SIM TKI terintegrasi dan pelaksanaan pilot project SIM TKI	Tersediarnya desain arsitektur SIM TKI terintegrasi dan pelaksanaan pilot project SIM TKI	Kementerian Komunikasi dan Informatika	

Peningkatan ...

107



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 112 -

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN 9 (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	INDUKRINTAH DAERAH (6)
Peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional	Pencapaian <i>Asian Economic Community (AEC) River Print</i> dalam rangka persiapan perdagangan AEC	Terwujudnya Inpres Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2011 untuk mendukung pemenuhan komitmen Indonesia pada AEC-Budget 2015	Terlaksananya pemenuhan komitmen Indonesia pada AEC-Budget 2015	Kementerian Koordinator Perencanaan	
	Peningkatan peran dan kemampuan Indonesia di bidang diplomasi perdagangan internasional terutama dalam rangka peningkatan akses pasar	Jumlah hasil perundingan Perdagangan Internasional	Terlaksananya 34 hasil perundingan Perdagangan Internasional	Kementerian Perdagangan	

PRIORITAS 14 ...

107



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 113 -

#### PRIORITAS 14: PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELIHARAN ? (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PENERIMA/DALAM DAERAH (6)
Peningkatan penyusunan pariwisata	Peningkatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri	Memingkatkan jumlah partisipasi pada bursa pariwisata internasional, pelaksanaan misi perijinan ( <i>cashier mission</i> ), peningkatan penyelenggaraan festival ( <i>event</i> ) dan Operationalisasi VITO ( <i>Visit Indonesia Tourism Officers</i> ) di 12 Kota	Terealisasinya 74 event hasil kerjasama seluruh stakeholder pariwisata dan beroperasinya VITO untuk mempromosikan pariwisata Indonesia.	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	Pemerintah Daerah terkait
		Memingkatkan jumlah penyelenggaraan promosi langsung ( <i>direct promotion</i> ), dan penyelenggaraan event pariwisata berskala nasional dan internasional	Terealisasinya 44 event penyelenggaraan promosi langsung ( <i>direct promotion</i> ) serta event pariwisata berskala nasional dan internasional	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	Pemerintah Daerah terkait

Pelaksanaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 114 -

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KUALIFIKASI (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
Pelaksanaan Kewirausahaan	Pengembangan kepramukaan	Meningkatkan jumlah pemuda yang dilatihasi dalam pendidikan kepramukaan	Tertfasilitasinya 1000 pemuda dalam pendidikan kepramukaan	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	
	Peningkatan kapasitas kewirausahaan pemuda	Meningkatkan kapasitas kewirausahaan pemuda melalui kebijakan dan fasilitasi pemerintahan kader	Terstabilnya peraturan pemerintah tentang pengembangan dan persediaan kewirausahaan pemuda	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	
			Tertfasilitasinya 3000 pemuda sebagai kader kewirausahaan	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	

Peningkatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 115 \*

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN 2 (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PELAKSANA/DASAR (6)
Peningkatan kecermatan gender dan pemberdayaan perempuan	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	Jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang	Terwujudnya 1 kebijakan dalam rangka pencegahan tindak pidana perdagangan orang	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemerintah Daerah terkait
	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	Terfasilitasinya 3 Pemda dalam perencanaan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	Terbentuknya 4 pedoman umum/Acuan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Terfasilitasinya ...

107



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 116 \*

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KILIKARAN ? (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PANGRINTAH DAERAH (6)
			Tertfasiliasinya Pemda di 16 Provinsi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemerintah Daerah terkait

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Sahman sesuai dengan aslinya

SEKRETARJAT KABINET RI  
Kepala Bidang Perencanaan,  
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja



*[Handwritten signature]*  
Ketua Bidang Perencanaan,  
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
24

#### PRIORITAS 4: PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN (*)	SASARAN	INSTANSI PENANGGULUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyempurnaan program bantuan sosial berbasis keluarga	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat berpendapatan rendah	Persebaran penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan	Tercapainya 70,2% penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin dan nyaris miskin) yang memiliki jaminan kesehatan	Kementerian Kesehatan	Pemerintah Daerah Provinsi
		Jumlah peserta yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin	Tercapainya 9,00% peserta yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin	Kementerian Kesehatan	
		Perentase RS peserta Jankesmas yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin	Tercapainya 80% RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jankesmas	Kementerian Kesehatan	

Peningkatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 25 -

PROGRAM	TINDAKAN	KUALIFIKASI	SASARAN	INSTANSI/TSANGGULING JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	Peningkatan intensitas pelayanan KB bagi masyarakat berpendapatan rendah	Jumlah peserta KB baru miskin (KPS dan KS-1) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokasi gratis melalui 23.000 Klinik KB pemerintah dan swasta	Tercapainya 3,8 juta peserta KB baru miskin (KPS dan KS-1) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokasi gratis	Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	
		Jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan KS-1) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokasi gratis melalui 23.000 Klinik KB pemerintah dan swasta	Tercapainya 12,2 juta peserta KB aktif miskin (KPS dan KS-1) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokasi gratis	Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	

Penyediaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 26 \*

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KUALIFIKASI (3)	SASARAN (4)	INSTANSI/TANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH/PATRAH (6)
	Penyediaan beasiswa pendidikan bagi masyarakat berpendapatan rendah	Jumlah peserta didik jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sasaran beasiswa miskin	Terselenggaranya beasiswa untuk: (a). Target 2.040.000 siswa SD/SDMB dari masyarakat berpendapatan rendah; (b). Target 961.849 siswa SMP/SMITB dari masyarakat berpendapatan rendah; (c). Target 508.124 siswa SMA dari masyarakat berpendapatan rendah; (d). Target 140.558 siswa SMK dari masyarakat berpendapatan rendah; (e). Target 67.000 mahasiswa dari masyarakat berpendapatan rendah	Kementerian Pendidikan Nasional	
		Jumlah siswa MI, MTs, MA dan mahasiswa PTA miskin yang memperoleh beasiswa	Terselenggaranya beasiswa untuk: a. Target 640.000 siswa MI miskin; b. Target 540.000 siswa MTs miskin; c. Target 320.000 siswa MA miskin; dan d. Target 59.438 mahasiswa PTA miskin	Kementerian Agama	

Pengantun ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 27 \*

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUANGAN *) (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PEMANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
	Penguatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah KTSM yang diperlukan bantuan tunai bersyarat/PKH mengesek pelayanan pendidikan dan kesehatan	Terdistribusinya bantuan tunai bersyarat/PKH pada 1.116.000 KTSM (total)	Kementerian Sosial	
		Meningkatkannya kapasitas dan manajemen pelaksanaan PKH dan penetapan Rumah Tangga Sasaran	Tertingkatkannya kapasitas keluarga dan manajemen pelaksanaan PKH serta serahkan akurannya persentase Rumah Tangga Sasaran	Kementerian Sosial	
	Penyediaan subsidi beras untuk masyarakat berpendapatan rendah (RASMIN)	Tersedianya RASMIN (dengan 15 kg per KTS selama 12 bulan) bagi KTS	Tercapainya pengetahuan rasmin kepada 17,5 juta orang KTS penerima RASMIN (dengan 15 kg per KTS selama 12 bulan)	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	

Tertibnya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
28

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *	SASARAN	INSTANSI/PEMANANG/TAJAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pelaksanaan redistribusi tanah	Jumlah bidang tanah yang didistribusikan dengan mekanisme lebih efektif berdasarkan evaluasi pelaksanaan 2010	Terdistribusikannya 100.000 bidang tanah dengan mekanisme yang lebih efektif	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	Pemerintah Daerah Provinsi
	Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja (kegiatan padat karya produktif)	Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja melalui paket karya produktif	Tercapainya 90.000 orang (sosi) yang mempunyai pekerjaan sementara	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA di 36 kabupaten/kota pada 15 provinsi	Tercapainya jumlah pekerja anak yang ditarik dari tempat kerja sebanyak 3.360 orang di 36 kabupaten/kota pada 15 provinsi	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Rehabilitasi ...

177



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 29 \*

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN *) (3)	SASARAN (4)	INSTANSI/TANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
	Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi orang dengan kecacatan dan anak serta pelayanan sosial bagi lansia	Jumlah orang dengan kecacatan yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi di dalam dan di luar negeri serta di masyarakat (fissa)	Terlayani, terlindungi, dan direhabilitasinya 40.013 orang dengan kecacatan di dalam dan di luar negeri serta di masyarakat	Kementerian Sosial	Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
		Jumlah anak dan balita terantar, anak jalanan, anak cacat, anak berkebutuhan dengan bukaan, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi di dalam dan di luar negeri serta di masyarakat (fissa)	Terlayani, terlindungi, dan direhabilitasinya 156.985 orang, anak dan balita terantar, anak jalanan, anak cacat, anak berkebutuhan dengan bukaan, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus pada Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)	Kementerian Sosial	Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
		Jumlah lanjut usia terantar yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi di dalam dan di luar negeri serta di masyarakat (fissa)	Terlayani, terlindungi, dan direhabilitasinya 27.837 orang lanjut usia terantar di dalam dan di luar negeri serta di masyarakat	Kementerian Sosial	Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintahan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 30 \*

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN *) (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PESERTA/TAHAP DAKWAH (6)
Penetapan PNPM Mandiri	Penetapan pelaksanaan PNPM inti	Jumlah kelurahan/desa yang mendapatkan pendampingan pembudayaan sosial	Tersebutnya 8.218 kelurahan yang mendapat pendampingan pembudayaan sosial	Kementerian Dalam Negeri	Pemerintah Daerah terkait
		Cakupan penangan PNPM- MP	Tersebutnya penanganan : 1) PNPM-MP 5.020 Kec di 393 Kab 32 Provinsi terdiri dari PNPM MfD Inti 3349 Kec di 393 Kab 32 Prov dan PNPM MfD penguatan 1671 Kec 322 Kab 32 Prov; 2) PNPM- MfD Perumahan sebanyak 80 Kec di 15 Kab 4 Provinsi ; 3) PNPM-MP Generasi 217 Kec. di 26 Kab 6 Provinsi; 4) PNPM-MfD SMP-SPPN (Integrasi) 73 Kab 30 Provinsi		

Peningkatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 31 \*

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN *) (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMBAHANTAI DAIRAH (6)
	Perluasan integrasi PPM Penguatan	Jumlah Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KLUKIP) penerima bantuan langsung masyarakat	Terselenggaranya bantuan langsung masyarakat Perikanan Tangkap untuk 1.000 KUB  Terselenggaranya bantuan langsung masyarakat Perikanan Budidaya untuk 2000 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokbakid)	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemerintah Daerah terkait
			Terselenggaranya BLM (bantuan langsung masyarakat) untuk 750 KUCAR (Kelompok Usaha Garam Rakyat)	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemerintah Daerah terkait
			Tertaskannya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan untuk 408 Poklatser (Kelompok Pengolah dan Pemasar)	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemerintah Daerah terkait

Jumlah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 32 \*

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUASAN *) (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGULUNG JAWAB (5)	PISAPERINTAH DAERAH (6)
		Jumlah desa yang dikembangkan	Tercapainya 569 desa yang dikembangkan dengan kegiatan ekonomi berbasis pariwisata	Kementerian Pertanian dan Parwisata	Pemerintah Daerah terkait
Perluasan Pelayanan KUR	Peningkatan dukungan, penjaminan dan pertasan Jangkauan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Penyaluran KUR oleh Bank Pelaksana meningkat	Tersalurkannya KUR sejumlah 20 triliun rupiah	Kementerian Koordinator Perekonomian	Pemerintah Daerah Provinsi terkait
		Peningkatan pangsa penyaluran KUR kepada sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kebutuhan, industri	Tertingkatkan pangsa penyaluran KUR kepada sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kebutuhan, dan industri sehingga mencapai 25% dari realisasi KUR yang tersalurkan	Kementerian Koordinator Perekonomian	Pemerintah Daerah Provinsi terkait

PRIORITAS 5 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 33 \*

### PRIORITAS 5: KEPAHAMAN PANGAN

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN *) (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
Peningkatan Produksi Pangan	Pengelolaan air untuk pertanian melalui pemanfaatan air irigasi	Optimasi pemanfaatan air irigasi melalui perbaikan JITUT, Ji-DES dan pengembangan TAM yang bertangai	Terselesainya perbaikan JITUT di 30 provinsi seluas 95.000 hektar	Kementerian Pertanian	Pemerintah Daerah terkait
			Terselesainya perbaikan Ji-DES di 29 provinsi seluas 79.000 hektar		
	Pengembangan dan perceblahan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengaliran lainnya	Peningkatan luas layanan jaringan irigasi dan rawa	Terselesainya pengembangan TAM di 13 provinsi seluas 48.000 hektar	Kementerian Pekerjaan Umum	Pemerintah Kabupaten/Kota terkait
			1) Terselenggaranya perbaikan jaringan irigasi seluas 52.690 Ha; 2) Terselenggaranya perbaikan jaringan irigasi rawa seluas 50.606 Ha; 3) Terselenggaranya perbaikan jaringan irigasi air tanah 2.152 Ha		

Rehabilitasi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 34 -

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KUALIFIKASI (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PELAKSANAAN (6)
	Peningkatan produksi ternak ruminansia	Peningkatan ternak ruminansia	1) Terselenggaranya rehabilitasi jaringan irigasi seluas 108,153 ha; 2) Terselenggaranya rehabilitasi jaringan irigasi rawa seluas 86,920 ha; 3) Terselenggaranya rehabilitasi jaringan irigasi air tanah 5,204 ha	Kementerian Pertanian	Pemerintah Kabupaten/Kota terkait
	Penyediaan kapal nelayan dan pengembangan perikanan di berbagai daerah	Jumlah pengadaan kapal perikanan yang di donasi APBN dan DAK KP	Tercapainya jumlah pengadaan kapal perikanan dinas 30 GT sebanyak 250 kapal, dimana 125 kapal didanai APBN dan 125 kapal lainnya dipenuhi melalui DAK KP Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemerintah Daerah terkait

Jumlah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 35 \*

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUASAN ? (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
	Pengembangan Unit Pembinaan Ikan	Jumlah unit pembinaan yang bersertifikat dan memenuhi standar	Tercepatnya 63 unit pembinaan yang bersertifikat dan memenuhi standar	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemerintah Daerah terkait
	Pembinaan dan Pengembangan Pemasaran Ikan	Jumlah pasar ikan tradisional yang tertina dan berfungsi sesuai standar	Terperluhnya pasar ikan yang dibina dan dikembangkan menuju standar di 7.000 pasar: 1. Pembinaan di 6.927 pasar; 2. Pengembangan dan pembinaan di 73 pasar (63 pasar baru dan 10 pasar lanjutan)	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemerintah Daerah terkait

Penyusunan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 36 \*

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN 2) (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEKERJA/TAH DAERAH (6)
	Penyuluhan bantuan dan subsidi benih	Terselenggaranya bantuan dan subsidi tanaman pangan	1) Terlaksananya: Penyuluhan bantuan langsung benih unggul (BLBU) 80.000 ton; 2) Pengadaan/penyuluhan cadangan benih nasional (CASN) 17.000 ton; 3) Penyuluhan benih subsidi harga 68.000 ton	Kementerian Pertanian	Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait
		Luas lahan tanaman padi, jagung dan kedelai yang menerapkan PTT	Terlaksananya SL-PTT Padi, jagung dan kedelai seluas 3,2 juta ha	Kementerian Pertanian	Pemerintah Daerah terkait
		Areal Giling Tebu (Keleuan tebu giling/KTC)	Terlaksananya areal giling tebu 450.000 ha	Kementerian Pertanian	Pemerintah Daerah terkait
		Benih unggul tebu yang digunakan	Terselenggaranya 45% benih unggul tebu bermutu	Kementerian Pertanian	Pemerintah Daerah terkait

Calon ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 37 \*

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KILUANGAN *) (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
		Calon lahan dan calon petani peserta program revitalisasi perkebunan (KPTN- RP) untuk komoditi Kelapa sawit	Tersebutnya calon petani dan calon lahan program revitalisasi perkebunan (KPTN- RP) untuk komoditi Kelapa sawit seluas 50.000 ha	Kementerian Pertanian	Pemerintah Daerah terkait
		Berikut unggul sawit yang digunakan	Tersebutnya 128.000 batang bibit sawit unggul bermutu	Kementerian Pertanian	Pemerintah Daerah terkait
		Jumlah Poktan/capoktan yang terbentuk dan melakukan penyuluhan pertanian	Terlaksananya pengujian 32.000 poktan/capoktan pertanian	Kementerian Pertanian	Pemerintah Daerah terkait
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang terbentuk sesuai UU/ No. 16/2006	Terbentuknya 144 unit kelembagaan penyuluhan pertanian	Kementerian Pertanian	Pemerintah Daerah terkait

107





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
39

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN *) (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
	Perluasan areal pertanian	Luas areal pertanian baru yang dibuka	Tercapainya perluasan areal pertanian baru 110.000 ha	Kementerian Pertanian	Pemerintah Daerah terkait
		Diselenggarakannya RFP pengelolaan sistem informasi Pertindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), insentif dan pemberdayaan petani, dan pembiayaan PLP2B menjadi IP	Terasutusnya dan diselenggarakannya RFP tentang pengelolaan sistem informasi PLP2B	Kementerian Pertanian	
			Terasutusnya RFP tentang insentif dan pemberdayaan petani	Kementerian Pertanian	
			Terasutusnya RFP tentang pembiayaan PLP2B	Kementerian Pertanian	

Peningkatan ...

AA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
40

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN *) (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
Kevlalisasi Industri pertanian	Kevlalisasi Industri gula Pupuk	Terlaksananya revlalisasi industri pupuk	Terlaksananya pembelian mesin peralatan pada 25 pabrik gula melalui subsidi bunga	Kementerian Perindustrian	
			Terlaksananya pembelian mesin peralatan pada 25 pabrik gula melalui subsidi bunga	Kementerian Perindustrian	
			Terwujudnya peta potensi lahan baku pupuk organik di 50 Kabupaten/Kota	Kementerian Perindustrian	

Pemenuhan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 41 \*

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELAYAKAN <sup>2)</sup> (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
Peningkatan konsumsi pangan dan penanganan kerawanan pangan	Peningkatan ketersediaan dan peningkatan rawan pangan	Jumlah desa rawan pangan yang melaksanakan kegiatan desa mandiri pangan	Tercapainya jumlah desa rawan pangan yang dibina dalam Desa Mandiri sebanyak 2.200 desa di 400 Kabupaten/Kota pada 33 Provinsi	Kementerian Pertanian	Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait
		Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan Peningkatan Perencanaan Kegiatan Pangan (P2KP)	Tercapainya jumlah desa kelompok yang melaksanakan kegiatan P2KP (Peningkatan Perencanaan Kegiatan Pangan) sebanyak 3.600 desa di 259 Kab/Kota pada 33 provinsi		
		Jumlah kelompok lembaga pangan yang diberdayakan	Diberdayakannya 700 kelompok lembaga pangan masyarakat	Kementerian Pertanian	Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait

Peningkatan...

AM



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
42

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN ? (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
Peningkatan efisiensi pasar komoditi pangan	Penguatan kelembagaan koperasi dibalangan petani Koperasi dan UMKM	Terselesainya program perkoperasian kepada kelompok dan kelompok tani	Terlaksananya Sosialisasi perkoperasian kelompok tani/ kelompok di 15 Prognosis	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Pemerintah Daerah terkait
	Dukungin penerusan produk koperasi dan UMKM	Facilitasi sarana pasar tradisional yang dikelola oleh koperasi	Terfasilitasinya 6 sarana pasar tradisional yang dikelola oleh koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Pemerintah Daerah terkait
	Perkuatan Koperasi pedesaan melalui bantuan pemodalan	Terselesainya dukungan pemodalan untuk koperasi di pedesaan dan perkotaan	Terlaksananya penyaluran dana bagi 100 koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Pemerintah Daerah terkait

PRIORITAS 6 ...

107



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 43 -

## PRIORITAS 6: INFRASTRUKTUR

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN 7 (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
Penataan tata ruang dan pertanahan	Percepatan penyelesaian KTRW provinsi, kabupaten dan kota serta Kawasan Strategis Nasional	Jumlah KTRW provinsi, kabupaten dan kota yang mendapat persetujuan subsidi dari Menteri PU	Terselesainya Rencana Tata Ruang Wilayah (KTRW) terkonsentrasi pada 16 provinsi dan 152 kabupaten/kota yang mendapat persetujuan subsidi dari Menteri PU	Kementerian Pekerjaan Umum	Pemerintah Daerah terkait
		Terselesainya draft rancangan peraturan presiden (perpres) tentang KTR Pulau/kepulauan dan Kawasan Strategis Nasional (KSN)	Terselesainya 13 Draft Raperpres tentang KTR Pulau/kepulauan dan KSN yang telah siap dibahas di Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)	Kementerian Pekerjaan Umum	Pemerintah Daerah terkait
	Pengadaan lahan untuk kepentingan umum	Terselesainya konsep peraturan pelaksanaan UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Terselesainya konsep peraturan pelaksanaan UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	

Peningkatan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 44 -

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN *) (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEKERJAAN DAERAH (6)
Peningkatan <i>domestic connectivity</i>	Penyelesaian pembangunan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB dan NTT serta pelaksanaan percepatan dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan nasional (1.521,00 km)	Panjang jalan yang dirangsang kapasitasnya (pelebaran)	Tertingkatkan kapasitas jalan (pelebaran) sepanjang 1.521 km	Kementerian Pekerjaan Umum	
		Panjang jembatan yang dibangun	Tertanggunya 7.500 m jembatan	Kementerian Pekerjaan Umum	
		Panjang <i>diverter/ underpass</i> yang dibangun	Tertanggunya 3.400 m <i>diverter/ underpass</i>	Kementerian Pekerjaan Umum	
		Panjang jalan <i>lingkar/ bypass</i> yang dibangun	Tertanggunya 33 km jalan <i>lingkar/ bypass</i>	Kementerian Pekerjaan Umum	

Panjang...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 45 \*

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN *) (3)	SASARAN (4)	INSTANSI/TANGGUNG JAWAB (5)	PESERTA/TAH DAERAH (6)
		Panjang jalan strategis di lintas selatan Jawa, perbaikan, pemencil dan terhar yang dibangun	Tertanamnya 200 km jalan strategis di lintas selatan Jawa, di wilayah perbaikan, pemencil dan terhar terbangun	Kementerian Pekerjaan Umum	
		Panjang jalan yang dipereceva	Terecevasinya 26.900 km jalan	Kementerian Pekerjaan Umum	
		Panjang jembatan yang dipereceva	Terecevasinya 140.000 m jembatan	Kementerian Pekerjaan Umum	
		Jumlah paket kegiatan yang dilaksanakan dengan <i>performance-based contract</i>	Terkontraknya 2 paket kegiatan yang dilaksanakan dengan <i>performance-based contract</i>	Kementerian Pekerjaan Umum	

Penerbitan...

407



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
46

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUASAN *) (3)	SASARAN (4)	INSTANSI/TANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
	Penyusunan Sistem Transportasi Perkotaan	Peraturan Presiden tentang Mاستerplan Transportasi Terpadu Jabodetabek	Tertibnya Peraturan Presiden tentang Masterplan Transportasi Terpadu Jabodetabek	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	
	Menerapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan ( <i>bencharking</i> )	Standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan ( <i>bencharking</i> ) untuk setiap pelabuhan yang diusahakan secara komersial (Pelaksanaan UU 17/2008 Pasal 84)	Tersedianya standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan ( <i>bencharking</i> ) untuk setiap pelabuhan yang diusahakan secara komersial telah ditetapkan	Kementerian Perhubungan	

Ditandatangani ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 47 \*

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELAYAKAN ? (3)	SASARAN (4)	INSTANSI/PANGKALAN JAWAB (5)	PESAMPINGAN DAERAH (6)
Pembangunan jaringan transmisi dan perantara sarana transportasi antar-modul dan antar-pulau	Pembangunan terminal antar negara dan antar provinsi	Pembangunan 2 terminal antar negara	Tertetapkannya desain kontrak <i>multi-years</i> berbasis kinerja untuk pelayanan perintis dan angkutan penyeberangan	Kementerian Perhubungan	Pemerintah Daerah
	Mengefektifkan <i>dry port</i> sebagai bagian dari sistem konektivitas pada kawasan industri	Pembangunan jalur kereta api ( <i>red</i> ) dari <i>Dry Port FT, Jababeka, Cikarang ke jalur kereta api existing</i>	Tertetapkannya desain kontrak <i>multi-years</i> berbasis kinerja untuk pelayanan perintis dan angkutan penyeberangan	Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	
		Pembangunan 2 terminal antar negara	Tertetapkannya 2 terminal antar negara : 1) Pembangunan tahap lanjutan: Pembangunan Terminal ALEN Sel Ambawang, Kalimantan Barat 2) Pembangunan baru/ tahap pertama: Pembangunan Terminal ALEN Kefa, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur	Kementerian Perhubungan	Pemerintah Daerah terkait

Pembangunan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 48 \*

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELAYAKAN ? (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
	Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana KA: Terbangunnya jalur KA baru termasuk jalur ganda (117,93 km)	Pembangunan jalur KA berupa: 1) Pembangunan tubuh baan, 2) Pemasangan rel, 3) Jembatan dan box culvert	Terbangunnya tubuh baan antara Losari- Babakan dan antara Babakan- Waruduwur sepanjang 11,25 Km sp	Kementerian Perhubungan	Pemerintah Daerah terkait
			Terpasangnya Kel R. 54 antara Pekalongan-Sengi-Comal- Petarukan dan antara Lamongan-Tegal sepanjang 28 Km sp	Kementerian Perhubungan	Pemerintah Daerah terkait
			Terbangunnya Jembatan KA dan Box culvert antara Pekalongan- Sengi-Comal- Petarukan dan Lamongan-Tegal sebanyak 23 Uml	Kementerian Perhubungan	Pemerintah Daerah terkait
			Terbangunnya Tubuh Baan antara Sta. Lamongan-Sta. Dikedak Sampelan Lintas Boyonegoro- Pasarturi sepanjang 13,9 Km	Kementerian Perhubungan	Pemerintah Daerah terkait

Terbangunnya...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 49 \*

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	SASARAN	INSTANSI/PENANGGUNG JAWAB	PASIBERKATAH/DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Tertanggungnya Tubuh Badan KA antara Prupuk-Kretek sepanjang 19,70 Km sp	Kementerian Perhubungan	Pemerintah Daerah terkait
			Tertanggungnya Tubuh badan Jln. KA Keunggulan-Larangan-Senggom antara Ketanggungan-Prupuk sepanjang 15,50 Km sp	Kementerian Perhubungan	Pemerintah Daerah terkait
			Tertanggungnya jembatan KA Baru antara Prupuk-Pituguran sebanyak 4 Unit	Kementerian Perhubungan	Pemerintah Daerah terkait
			Tertanggungnya pembangunan tubuh badan KA antara Serpong-Maja sepanjang 4,05 Km sp	Kementerian Perhubungan	Pemerintah Daerah terkait
			Tertanggungnya rel jalur ganda antara Serpong - Puncung Panjang sepanjang 11,75 Km sp	Kementerian Perhubungan	Pemerintah Daerah terkait

Tertanggungnya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
50

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN *) (3)	SASARAN (4)	INSTANSI/PINANGKAT/ANGKAT JAWAB (5)	PASIBERNTAH DAERAH (6)
			Tertanggungjawab jembatan KA baru antara Serpong-Majalengka sebanyak 1 (satu) unit	Kementerian Perhubungan	Pemerintah Daerah terkait
			Tertanggungjawab tubuh badan jalur KA antara Bogor-Indah-Duri dan antara Kalideres-Bogor melalui lintas Duri--Tangerang sepanjang 11,88 Km sp	Kementerian Perhubungan	Pemerintah Daerah terkait
			Tertanggungjawab penataan spoor KA di emplacement Cikadondong lintas Cikampek-Padalarang sepanjang 1,20 Km sp	Kementerian Perhubungan	Pemerintah Daerah terkait
			Tertanggungjawab sinyal jalur ganda antara Serpong-Tarung Panjang sebanyak 3 (tiga) paket	Kementerian Perhubungan	Pemerintah Daerah terkait

Pembangunan ...

707



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 51 \*

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN *) (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PASIBERINTAH DAERAH (6)
	Pembangunan MRT dan kelanjutan proyek monorel di Jakarta	Persiapan pelaksanaan monorel	Terselesainya pengakhiran pemutusan kerjasama dengan PT. Jakarta Monorel oleh Pemprov DKI	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri	
	Pembangunan Bandara Kualanamu	Pembangunan sisi udara dan sebagian fasilitas operasi bandara (sisi darat) panjang runway 3750 x 60 m	Tertajarkannya pembangunan sisi udara yang meliputi landasan pacu, taxi way, apron, dan peralatan navigasi; Rencana progress s/d akhir 2011 adalah 90,2%	Kementerian Perhubungan	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Pelaksanaan...

109



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
52

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN 7)	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PISAPERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Rehabilitasi jalan tol lintas Jawa	Pelelangan pekerjaan konstruksi MRT Jakarta	Terlaksananya Pelelangan Pekerjaan Konstruksi MRT Jakarta Tanggal 25 Januari 2011 dokumen RENCANA telah diserahkan kepada Gubernur DKI. Untuk selanjutnya tahapan pekerjaan pembangunan MRT Jakarta dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Pemprov DKI; Kontrak Pekerjaan Konstruksi MRT Jakarta	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri	
	Rehabilitasi jalan tol lintas Jawa	Percepatan pembangunan jalan tol lintas Jawa melalui penyerapan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) format baru, dimulainya pelaksanaan konstruksi ruas Cikopo-Palimanan	Terlaksananya restrukturisasi PPT format baru dimulainya, konstruksi ruas Cikopo-Palimanan dimulai	Kementerian Pekerjaan Umum	

Pengembangan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 53 \*

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN *) (3)	SASARAN (4)	INSTANSI/PENANGGUNG JAWAB (5)	PESERTA/TAHAP DAERAH (6)
Pergembangan perumahan dan permukiman	Pembangunan rumah susun sederhana sewa	Jumlah Rumah-rumah Terbangun ( <i>Over Block</i> )	Tertanggungjawab Rumah-rumah Tahun Anggaran 2011 / 2012 sebanyak 100 TB ( <i>Overblock</i> )	Kementerian Perumahan Rakyat	Pemerintah Daerah terkait
			Tertanggungjawab Rumah-rumah Tahun Anggaran 2010 - 2011 sebanyak 49 TB ( <i>Overblock</i> )	Kementerian Perumahan Rakyat	Pemerintah Daerah terkait
		Pelaksanaan sosialisasi pengeloaan Rumah-rumah dan penciptaan perumahan rumah-rumah (TB siap fiak, siap huni dan dilahi, dan siap aset)	Tertanggungjawab sosialisasi pengeloaan rumah-rumah dan penciptaan perumahan rumah-rumah (TB siap fiak, siap huni dan dilahi, dan siap aset) Rumah-rumah	Kementerian Perumahan Rakyat	Pemerintah Daerah terkait
		Jumlah rumah-rumah terbangun ( <i>Over Block</i> ) di kawasan kumuh	Tertanggungjawab pembangunan rumah-rumah sebanyak 70 TB ( <i>Overblock</i> ), dengan rincian: 1) 57 TB selasi 100% 2) 20 TB selasi 40% 3) 13 TB selasi 20%	Kementerian Pekerjaan Umum	

Pembangunan ...

107



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

54

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN 7)	SASARAN	INSTANSI/PENANGKALING JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pembangunan rumah layak huni bersubsidi	Jumlah fasilitas dan stimulasi Prasarana Sarana Umum (PSU) untuk rumah layak huni bersubsidi	Tertanggungjawab PSU perumahan dan pemukiman untuk mendukung pembangunan 117.010 unit rumah layak huni bersubsidi	Kementerian Perumahan Rakyat	Pemerintah Daerah terkait
		Pengembangan kegiatan pembiasaan perumahan dan pemukiman	Terus-menerus kegiatan untuk meningkatkan efektivitas pembiasaan perumahan dan pemukiman sebanyak 1 (satu) Peraturan Menteri	Kementerian Perumahan Rakyat	Pemerintah Daerah terkait
Pengendalian banjir	Penyelesaian Kanal Banjir Timur	Penyelesaian Kanal Banjir Timur	Terselenggaranya satu pekerjaan sepanjang 500 m sesuai desain sepanjang bagian dari 2,9,2 km	Kementerian Pekerjaan Umum	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	Pembangunan waduk dan prasarana pengendali banjir DAS Bergawan Solo	Penyelesaian Waduk Groggung	Terselenggaranya pembangunan 1 buah Waduk Groggung 100% (lanjutan 2010)	Kementerian Pekerjaan Umum	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Pengembangan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 55 -

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN 1)	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi	Legalisasi Pemanfaatan ICT Fund dan persiapan pembangunan backbone Palapa Ring	Desainnya dasar hukum pemanfaatan ICT Fund dan penyiapan tender pembangunan jaringan Palapa Ring	Tertaskarannya pemanfaatan ICT Fund untuk pembangunan Palapa Ring : 1) Terbitnya surat persetujuan Menteri Keuangan terkait model bisnis <i>ICT Fund</i> ; 2) Terselenggaranya regulasi lain yang dipertakang; 3) Review Desain dan Feasibility Study pembangunan jaringan Palapa Ring; 4) Penyusunan Dokumen Tender Pembangunan Palapa Ring	Kementerian Komunikasi dan Informatika	
Peningkatan Penyediaan infrastruktur dengan skema KPS/PPP	Pelaksanaan 5 showcase penyediaan infrastruktur dengan skema KPS/PPP	Pelaksanaan Showcase 1: Air Minum Umbulan, Jalan	Tersusunnya Dokumen <i>Pro</i> / <i>AS</i> Pembangunan Air Minum Umbulan serta dimulainya proses transaksi	Sudan Koordinasi Penanaman Modal (BKPNAD)	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
		Pelaksanaan Showcase 2: Jalan Tol Kualaeranu, Sumut	Terselenggaranya Laporan Periodik Pembinaan Laban	Sudan Koordinasi Penanaman Modal (BKPNAD)	

Tertandatanganinya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 56 \*

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN 1)	SASARAN	INSTANSI/PISANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Peleaksanaan Showcase 3 Pembangkit listrik Jawa Tengah	Ditertibkannya Penjaminan Pemerintah ( <i>Guarantee</i> <i>Agreement</i> ) dan Peleaksanaan belang PTU 2 X 1000 MW dengan skema KPS	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	
		Peleaksanaan Showcase 4: KA Manggara - Soerba, DKI Jakarta.	Terusunnya dokumen Pre FS Pembangunan KA Bandera Soerba - Susiun Manggara dan dimulainya proses pra-kualifikasi	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	

Peleaksanaan ...

107



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 57 \*

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELAYAKAN <sup>3</sup> (3)	SASARAN (4)	INSTANSI/TANGGUNG JAWAB (5)	PEMBERITA/DALAM (6)
Penurunan tingkat kecelakaan kecelakaan transportasi	Penurunan tingkat kecelakaan transportasi darat, kereta api, laut dan udara	Penurunan, Kelelahan, dan pemeliharaan prasarana navigasi penerbangan	Tersusunnya dokumen <i>project info memo</i> , dimulainya proses <i>market sounding</i> dan dimulainya proses pabriklifikasi	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	
		Instruksi Presiden tentang Rencana Umum Keselamatan Jalan Nasional	Tertibnya instruksi Presiden tentang Rencana Umum Keselamatan Jalan Nasional	Kementerian Perhubungan	
		Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik	Tertibnya Perubahan Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS	
		Pengukuhan Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan	Pengukuhan Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan	Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	

PRIORITAS 7 ...

17



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 58 -

### PRIORITAS 7: IKLIM USAHA DAN IKLIM INVESTASI

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KETUJUAN 7 (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
Penyederhanaan prosedur investasi dan usaha	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Jumlah PTSP telah ditetapkan kualifikasi perkembangan dan SDM	Tercapainya 265 PTSP yang telah ditetapkan kualifikasi kelengkapan dan SDM	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
	Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Dan Pertanahan Investasi Secara Elektronik (SPHISE) pada PTSP	Jumlah sektor layanan SPHISE terkait proses perizinan dan nonperizinan	Terlaksunanya proses perizinan dan nonperizinan oleh SPHISE melalui penyediaan Master Data penanaman modal yang dapat digunakan untuk 15 sektor	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
		Jumlah PTSP Kab/Kota yang mengimplementasikan SPHISE	Terlaksunanya SPHISE di 50 PTSP Kab/Kota	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Jumlah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 59 -

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN *) (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PENERIMA/DIARAH (6)
Pengembangan Sistem Pelabahan Nasional	Perbaikan Kinerja di Pelabahan Tanjung Priok, Belawan dan 7 lainnya	Penyelesaian pengembangan Pelabahan Belawan Medan	Teresetornya sarana/peserta di Pelabahan Belawan	Kementerian Perhubungan	
	Perluasan Pelabahan Tanjung Priok	Jumlah Kab/Kota yang menerima sosialisasi & pelatihan SDM untuk memenuhi kualifikasi	Tersedianya komputer dan akses internet untuk implementasi SPT/SE di 50 Kab/Kota	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Jumlah ...

107



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 60 -

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN 7)	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peningkatan kelancaran pelaksanaan kegiatan ekspor-impor	Pengembangan dan percepatan sistem Nasional Single Window (NSW) dan ASEAN Single Window (ASW)	Tersedianya Sistem Single Sign On (SSO) Tahap 1 untuk diterapkan pada Portal INSW antara Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan BPCOM	Tertunggungnya/ lengkapkannya/ terselesaikannya 7 pelabuhan strategis yaitu lokasi di Binang, Balikpapan, Dumai, Azar (Sorong), Terate, Prebolinggo, dan Pantissian	Kementerian Perdagangan	
		Tersusunnya konsep model dan struktur kelembagaan untuk pengelolaan dan pengoperasian sistem NSW	Tertetapkannya Percepatan Tahap 1 SSO pada Portal INSW antara DJBC dan BPCOM	Kementerian Koordinator Perekonomian	

Tersedianya...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 61 \*

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN 2)	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PANGERTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Melakukan integrasi sistem yang terkait dengan pengamanan barang dan penyelesaian dokumen impor	Diterapkannya integrasi sistem antara Sistem TTS Online dengan Portal INSW	Terimplementasinya Portal pada Portal INSW yang berfungsi sebagai referensi utama (single-reference) dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dari seluruh K/L terkait	Kementerian Koordinator Perkonomian	
	Koordinasi penataan dan pengembangan sistem logistik nasional	Penyusunan kebijakan sistem logistik nasional	Teratnya Ferpres tentang Sistem Logistik Nasional	Kementerian Koordinator Perkonomian	

Penyederhanaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
62

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN 2)	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PISABERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyoderhanaan kebijakan Tuna Kelala Bongkar Muat untuk berwujudnya persialngan usaha yang sehat	Penghapusan SKB 3 Dirjen (Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Bina Hubunggan Ketenagakerjaan, Dirjen Bina Lembaga Koperasi) agar sesuai dengan kondisi proses kerja/bisnis di pelabuhan saat ini sehingga tidak ada monopoli	Terlakannya revisi pasal-pasal SKB 3 Dirjen (Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Bina Hubunggan Ketenagakerjaan, Dirjen Bina Lembaga Koperasi) yang memungkinkan terjadinya monopoli	Kementerian Perhubungan	
	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bongkar Muat	Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bongkar Muat	Terbitnya SK Menteri tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bongkar Muat	Kementerian Perhubungan	
	Melakukan studi tentang <i>dwelling time</i> (lama waktu penampungan peti kemas) dalam rangka mendukung percepatan arus barang di pelabuhan	Terlakannya Studi tentang <i>dwelling time</i> (lama waktu penampungan peti kemas) dalam rangka mendorong percepatan arus barang di pelabuhan	Tersebutnya hasil Studi tentang <i>dwelling time</i> (lama waktu penampungan peti kemas) dalam rangka mendorong percepatan arus barang di pelabuhan	Kementerian Perhubungan	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 63 -

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN 1 (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha	Penyusunan Peraturan yang dapat mendorong partisipasi kewirausahaan dan meningkatkan kinerja dan daya saing industri (DI)	Penyusunan bahan pengempurnaan Undang-undang No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan	Tersedianya bahan masukan pengempurnaan UU No 13/2003 hasil pembahasan oleh organisasi pekerja/buruh dan oleh organisasi pengusaha	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Penyusunan bahan pengempurnaan peraturan tentang Organisasi Pekerja/Buruh	Tersedianya kajian sebagian bahan pengempurnaan peraturan tentang organisasi pekerja/buruh	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Penyusunan bahan pengempurnaan peraturan tentang penyelesaian perselisihan Hubungan Industri (HI)	Tersedianya kajian sebagai bahan pengempurnaan peraturan tentang penyelesaian perselisihan HI	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
64

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN 1)	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengembangan perdagangan dalam negeri	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan sarana distribusi dalam rangka ketahanan distribusi barang pokok	1. Terselenggaranya 10 pasar percontohan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan tahap 1 2. Terselenggaranya 20 pasar percontohan untuk tahap pre-proyek (konsep Pengembangan Asriekuar) Terselenggaranya 1 pusat distribusi	Kementerian Perdagangan	Pemerintah Daerah terkait
			Terselenggaranya 3 rekomendasi pemetaan sistem distribusi	Kementerian Perdagangan	Pemerintah Daerah terkait
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Kegiatan koordinasi pengembangan urusan perikanan marang dan pengembangan wilayah (termasuk KEK)	Ditelapkannya Kawasan Ekonomi Khusus	Ditelapkannya 2 lokasi KEK	Kementerian Koordinator Perekonomian	

Penyusunan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 65 -

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN 2)	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengyusunan Rencana Aksi Penyelenggaraan KTK	Tersusunnya dokumen Rencana Aksi 2 KTK yang ditetapkan	Kementerian Koordinator Perencanaan	
	Pengembangan zona industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan identifikasi lokasi yang layak untuk dikembangkan sebagai KTK	Peningkatan fasilitas pengembangan zona industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Terselenggaranya 3 (tiga) Dokumen Fasilitas (Master Plan, Rencana di 2 (dua) lokasi terpilih: Sei Mangkei (Sumatera Utara) dan Bihang (Sulawesi Utara)	Kementerian Perindustrian	
			Terselenggaranya 1 (satu) dokumen kelayakan ekonomi dan finansial untuk lokasi Sei Mangkei (Sumatera Utara)		
Harmonisasi peraturan dan keputusan hukum	Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS)	Pelaksanaan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS)	Terselainya rekonsolidasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS)	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS	

Pengelolaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 66 -

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN *) (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PANGERTAH DAERAH (6)
	Pengelolaan Pertanahan Provinsi	Pertumbuhan pengembangan infrastruktur pertanian secara nasional, regional dan sektoral, yang diperlukan di seluruh Indonesia	Tercapainya cakupan Peta Pertanahan sebesar 2,8 juta hektar	Rodan Pertanahan Nasional (RP2N)	Pemerintah Daerah terkait
	Sinkronisasi Peraturan Perjujian Terkait Kehutanan	Pelaksanaan percepatan legalisasi aset pertanahan, keberhasilan administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah	Tercapainya 572.000 bidang tanah yang dilegalisasi	Kementerian Kehutanan	Pemerintah Daerah terkait

PRIORITAS 8 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 67 -

## PRIORITAS 8: ENERGI

PROGRAM	TINDAKAN	KUJUKAN 2	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peningkatan kapasitas penyediaan listrik	Facilitasi pengembangan PLTU skala kecil di berbagai daerah	Terminasinya krisis listrik nasional	Terlaksananya 1 paket fasilitas pembangunan PLTU skala kecil terdistribusi di 71 lokasi (44 lokasi PLN dan 27 lokasi IEP) dengan total kapasitas 816 MW (425 MW oleh PLN dan 391 MW oleh IEP)	Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Pemerintah Daerah terkait
Pengembangan infrastruktur gas	Pembangunan ESRU di Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Tengah	Memastikan selesainya pembangunan ESRU di Jawa Barat pada Q1 2012	Terlaksananya fasilitas untuk terdistribusinya pembangunan 1 ESRU di Jawa Barat pada Q1 2012	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	Pemerintah Daerah terkait
		Memastikan selesainya pembangunan ESRU di Sumatera Utara pada Q3 2012	Terlaksananya fasilitas untuk terdistribusinya pembangunan 1 ESRU di Sumatera Utara pada Q3 2012	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	Pemerintah Daerah terkait

Memastikan ...

17



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 68 -

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>1)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pembangunan pipa gas lintas Jawa dan Kalimantan-Jawa	Memastikan selesainya pembangunan FSRU di Jawa Tengah pada Q3 2013	Tertindakannya fasilitasi untuk terselesainya pembangunan 1 FSRU di Jawa Tengah pada Q3 2013	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	Pemerintah Daerah terkait
		Memastikan pembangunan pipa gas Kepodang-Tanah Lotok untuk mengurangi penggunaan BRRI bagi FTTCU TanahKarek	Terselesainya program EPC pembangunan pipa gas Kepodang-FTTCU Tanah Lotok	EPH Migas	
		Memastikan dapat dilaksanakannya pembangunan pipa gas Kalimantan-Jawa atau opsi lain sesuai keputusan yang ada	Tercapainya keputusan yang memberikan kepastian alokasi pasokan gas untuk pipa gas Kalija atau opsi lain yang dipilih	EPH Migas	
		Memastikan dapat dilaksanakannya pembangunan pipa gas Cirebon-Semarang atau opsi lain sesuai keputusan yang ada	Tercapainya keputusan kepastian alokasi pasokan gas untuk pipa gas Cirebon-Semarang atau opsi lain yang dipilih	EPH Migas	

Terselesainya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 69 -

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>1)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PANGERTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pembangunan <i>Small Scale LNG receiving</i> terminal dan distribusi	Pelaksanaan pembangunan model <i>Small Scale LNG receiving</i> terminal	Terseleskannya proses FEED ( <i>Front End Engineering Design</i> ) pembangunan pipa gas Cirebon-Semarang	BPH Migas	
			Terlaksananya FEED dan DEX ( <i>Detailed Engineering Design Construction</i> ) pembangunan model <i>Small Scale LNG Receiving Terminal</i>	Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Mineral	
		Penyelesaian kajian kelayakan untuk pembangunan kilang mini LNG	Terlaksananya 1 bagian kelayakan pembangunan kilang mini plant LNG	Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Mineral (ESDM)	
		Pelaksanaan LNG <i>receiving</i> terminal di Indonesia Bagian Timur	Terlaksananya fasilitas pembangunan <i>Small Scale LNG</i> di Indonesia Bagian Timur oleh Pertamina sehingga dapat diselesaikan di Q4 2012.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	

Peringkatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 70 -

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN <sup>1)</sup> (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PANGERTAH DAERAH (6)
Peningkatan pasokan listrik	Pembangunan pembangkit, transmisi dan distribusi listrik untuk mencapai target rasio elektrifikasi	Pembangkit  Jaringan transmisi	Terlaksananya pembangunan pembangkit listrik dengan total kapasitas 37 MW di seluruh Indonesia  Terlaksananya pembangunan/ penyelesaian transmisi listrik di seluruh Indonesia sepanjang 772,2 km <i>over</i> AFRN 2010) dan 1064 km (AFRN 2011)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	

  
Garuda ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 71 -

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>1)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PENYERIKAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Gardu induk	Tertaskanannya pembangunan gardu induk di seluruh Indonesia dengan kapasitas sebesar 120 MVA (APBN 2011)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	
		Gardu induk	Tertaskanannya pembangunan gardu induk 9365 MVA (non APBN 2011)	Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	
		Gardu distribusi	Tertaskanannya pembangunan gardu distribusi di seluruh Indonesia sebanyak 370 MVA (APBN 2011)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	
		Gardu distribusi	Tertaskanannya pembangunan gardu distribusi di seluruh Indonesia 1077 MVA (non APBN 2011)	Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	

Jatenggan ...

7



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 72 \*

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN <sup>9</sup> (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PANGERTAH DAERAH (6)
	Pencapaian pembangunan 10.000 MW Tahap I dan II	Peningkatan program 10.000 MW Tahap I	Tertindakannya pembangunan jaringan distribusi di seluruh Indonesia sepanjang 1.5831 kms (APRN 2011)	Kemampuan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	
		Jaringan distribusi	Pembangunan jaringan distribusi di seluruh Indonesia sepanjang 10.596 kms (APRN 2011)	Kemampuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	
		Peningkatan program 10.000 MW Tahap I dan II	Tertindakannya perambatan kapasitas tambahan pembangkit sebesar 4222 MW pada tahun 2011	Kemampuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
73

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN <sup>1)</sup> (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PISABERHATAH DAERAH (6)
		Fasilitas pembangunan program 10.000 MW Tahap II	Tertastabilisnya pencapaian pembangunan 10.000 MW Tahap II (total 92 proyek) terdiri dari : 1) Proyek PLN ( sub-total 21 proyek): a) Pembekuan lahan 1 proyek; b) Konstruksi 1 proyek; c) Tansatangan Kontrak 7 proyek; d) Proses lelang 3 proyek; e) Persiapan F/S 9 proyek; 2) Proyek IPR (sub-total 71 proyek, 1 proyek terminasi sehingga sub-total proyek IPR menjadi 70 proyek): a) IPA 12 proyek; b) Proses Lelang 38 proyek; c) Proses lelang WKP FLTP 20 proyek	Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	

Pelaksanaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
74

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN <sup>1)</sup> (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PANGRINTAH DAERAH (6)
	Pengembangan coal bed methane (CBM) untuk menghasilkan gas dan memproduksi listrik di 2011	Dimulainya produksi gas dari CBM untuk listrik di 2011	Terselesukannya 1 paket revisi dan adanya rekomendasi tindak lanjut atas keterlambatan 10.000 MW tahap I, 10.000 MW tahap II, dan ITP	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	
		Kenyusunan kegiatan insentif bagi pengembangan CBM	Tersedianya produksi gas dari CBM sebesar 5,5 mmscf dan diproduksinya listrik dari CBM	Kementerian Keuangan	
			Terbitnya kegiatan insentif untuk pengembangan CBM berupa resmi PP No. 62 tahun 2008		

Pengembangan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 75 \*

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN <sup>1)</sup> (3)	SARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PENERIMA/DALAM (6)
Pengembangan panas bumi	Pembangunan dan peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi	Pembinaan up panas bumi dan kapasitas listrik	Tertafasilasiya peningkatan up panas bumi dan kapasitas listrik: 1. Ubanu 5 MW -- APBN; 2. Lahendong 20 MW -- PLN; 3. Dalam bentuk up sebesar 60 MW (Serulu) -- Meco; 4. Dimulainya pengheberan ekspansi untuk pengembangan PLTP Woyang, Winidu unit III -- Star Energy; dan 5. Pembangunan PLTP Ulibetu mencapai 50% total konstruksi -- PCT dan PLN	Kemertirian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
		Uraian amandemen Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi sehingga memungkinkkan kegiatan Panas Bumi di kawasan hutan Konservasi	Terseleksiannya uraian amandemen Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi untuk disampaikan ke Setrag dan dituliskan selambit-lambatnya masuk Prolegnas 2012	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	

Penambahan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
76

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>1)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PISAPRINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemantaban uap panas bumi dan kapasitas listrik	Tertanggungnya PLTP Ulimbu 5 MW -- APBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
			Tertanggungnya PLTP Lahendong 20 MW -- PLN & PGE	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
			Tertaksarannya uji produksi uap panas bumi sebesar 60 MW di Silungkang (Sarulla) -- Medco	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
			Dimulainya pengkecoran ekspansi untuk pengembangan PLTP Wiyang Winadu unit III -- Star Energy	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
			Tertanggungnya PLTP Uluhebi mencapai 50% total kontraksi - PGE dan PLN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	Pemerintah Provinsi Jawa Barat

107



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
77

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN <sup>1)</sup> (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PENERBITAH DAERAH (6)
Pengembangan energi alternatif non-panas bumi	Desa Mandiri Energi	Pembangunan Desa Mandiri Energi	Tertanggungjawab 50 DME yang terdiri dari : 15 DME dari Badan Baker Nabati (BBN) (di antaranya unit pengolahan biogas di 8 desa) dan 35 DME dari non BBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	Pemerintah Daerah terkait
			Tertanggungjawab 50 DME yang terdiri dari : 15 DME dari Badan Baker Nabati (BBN) (di antaranya unit pengolahan biogas di 8 desa) dan 35 DME dari non BBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	Pemerintah Daerah terkait

Pengembangan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
78

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN 2 (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PANGRINTAH DAERAH (6)
Pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Palembang dan rumah tangga	Penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Palembang dan Surabaya	Pembangunan SPRG di Palembang dan TEED pemanfaatan gas bumi untuk angkutan umum di Surabaya	Terbangunnya 4 SPRG di Palembang dan terselesainya TEED di Surabaya	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	
		Kenyediaan roadmap pemanfaatan gas bumi untuk transportasi	Terselesainya <i>roadmap</i> konversi BSM ke BRG untuk kendaraan umum di beberapa kota besar Pulau Jawa dan langkah awal implementasi di Palembang sehingga gas dapat digunakan untuk transportasi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	

Penambahan ...

MP



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 79 -

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>2)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PRAKORANTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kebutuhan untuk jaminan pasokan energi	Kebijakan untuk menenuhi kebutuhan pasokan gas untuk pembangkit listrik	Tercadanya 85,95 BRTUD dengan ekuivalen energi 30,8 TBTU pasokan gas untuk kebutuhan pembangkit listrik	Terhinya peraturan/keputusan yang memastikan alokasi 85,95 BRTUD dengan ekuivalen energi 30,8 TBTU pasokan gas untuk kebutuhan pembangkit listrik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	
	Pengendalian harga batubara acuan terhadap kerangka harga batubara dunia	Penetapan harga batubara acuan berdasarkan indeks harga batubara Indonesia dan indeks harga batubara internasional	Terhinya Keputusan Dirjen terang termaida harga batubara berdasarkan harga batubara Indonesia dan internasional; dan terlaksananya <i>review</i> dan penyesuaian secara periodik atas Harga Batubara Acuan (HBA)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	

Pencetakan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 80 \*

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KILIMARAN 2 (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
	Penerbitan peraturan untuk mencapai target lifting minyak bumi di 2014	Penerbitan Impres Khusus untuk mencapai target lifting minyak bumi di 2014	Tertibnya Impres Khusus yang memuat langkah-langkah untuk mencapai target lifting minyak bumi di 2014	Kementerian Koordinator Perekonomian	
	Penerbitan peraturan untuk mengatur FKPB dan KP Batubara lainnya	Penerbitan Impres Khusus untuk mengatur FKPB dan KP Batubara lainnya	Tertibnya Impres Khusus sinkronisasi untuk mengatur FKPB dan KP batubara lainnya	Kementerian Koordinator Perekonomian	

Peningkatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
81

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KEDIRIKAN 9 (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PANGERTAH/DALAM (6)
Penyediaan produksi minyak bumi untuk mencapai target lifting	Optimalisasi program intensifikasi produksi minyak bumi dengan minimasi jumlah <i>implantasi shutdown</i>	Minimasi jumlah <i>implantasi shutdown</i> guna mendukung pencapaian target lifting MBCPT MBCPT	Tercapainya minimasi kehilangan produksi minyak bumi karena urupanned <i>shutdown</i> selingga tidak lebih dari 12 MBCPT	BP Migas	
	Pengembangan blok Cepu untuk mencapai target lifting minyak bumi di 2014	Pelaksanaan kontraksi ERC 1-5 untuk memastikan Blok Cepu mulai berproduksi selambat-lambatnya pada kuartal I 2014	Dinulainya kontraksi ERC 1-5 pada kuartal III tahun 2011 untuk mencapai mechanical completion di 2013 dan produksi kuartal I 2014	BP Migas	
Subsidi energi tepat sasaran	Operasionalisasi pengaturan BSM bersubsidi	Ketepatan pengaturan BSM bersubsidi	Tercapainya persiapan pengaturan BSM bersubsidi untuk wilayah Jabodetabek agar terlaksana di tahun 2011 secara bertahap	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	

PRIORITAS 9 ...

7



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
82

### PRIORITAS 9: LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA

PROGRAM	TINDAKAN	KUALIFIKASI	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengelolaan Hutan	Penyenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas	Terehabilitasinya Hutan pada DAS prioritas seluas 100.000 rha ha  Terehabilitasinya lahan kritis pada DAS prioritas seluas 389.000 rha ha	Terebakannya rehabilitasi hutan pada DAS Prioritas seluas 100.000 ha.	Kementerian Kehutanan	Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota
		Tertaksananya pembuatan hutan kota seluas 1.000 ha	Tertaksananya pembuatan / rehabilitasi hutan kota seluas 1.000 ha.	Kementerian Kehutanan	Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota

Terehabilitasinya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 83 -

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN 2 (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
	Pengembangan Perhutanan Sosial	Pendataan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKM)/Hutan Desa seluas 500 ribu ha	Terfasilitasinya pendataan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKM)/Hutan Desa seluas 500 ribu ha	Kementerian Kehutanan	Pemerintah Kabupaten/Kota
		Terfasilitasinya hutan rakyat kemiskinan seluas 50.000 ha	Terperibujanya kemiskinan usaha ulahan hutan rakyat seluas 50.000 ha	Kementerian Kehutanan	Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota
		Terlaksananya fasilitasi pencapaian IHHRK unggulan di 6 lokasi	Terfasilitasinya pencapaian jenis HHHRK unggulan di 6 lokasi	Kementerian Kehutanan	Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota

Peningkatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
84

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KUILARAN ? (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
	Pengalokasian usaha hutang tanaman	Pencadangan areal Hutang Tanaman dan Hutang Tanaman Rakyat (HTT/HTR) seluas 550.000 Ha	Terbentuknya Surat Perintah Pertama HTT (Perintah Pengurusan Amdul) dan SK Pencadangan HTT seluas 550.000 Ha	Kementerian Kehutanan	Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota
	Pengalokasian Kawasan Hutang	Pemetaan batas kawasan hutang sepanjang 4.750 Km	Terlaksananya tata batas kawasan hutang sepanjang 4.750 Km	Kementerian Kehutanan	Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota
Penurunan Jumlah Hoopop Kebutuhan Hutang	Pengendalian kebutuhan hutang	Jumlah Hoopop di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi turun sebesar 20% dari rerata tahun 2005-2009	Tercapainya penurunan jumlah hoopop di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi sebesar 20% dari rerata tahun 2005-2009	Kementerian Kehutanan	Pemerintah Daerah terkait

Gerakan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 85 \*

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN ? (3)	SASARAN (4)	INSTANSI/PENANGGUNG JAWAB (5)	PESERTA/TAH DAERAH (6)
Cerakan Memeramu Pohon	Penanaman dan pemeliharaan pohon di sepanjang ruas jalan nasional dan di sepanjang bantaran sungai	Adanya pohon di sepanjang ruas jalan nasional dan di sepanjang bantaran sungai	Teratanya dan terpeliharanya pohon di sepanjang ruas jalan nasional sebanyak 49.000 pohon dan di sepanjang bantaran sungai sebanyak 88.480 pohon	Kementerian Pekerjaan Umum	
Peningkatan Pengelolaan DAS Serta Pengelolaan Hutan dan Lahan Gambut	Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	Terselenggaranya rencana pengelolaan DAS	Terusutanya Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (RPTDAST) pada 56 DAS prioritas	Kementerian Kehutanan	Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Provinsi Kabupaten/ Kota
			Tersedianya data dan peta lahan kritis di 29 RPTDAS		Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Provinsi Kabupaten/ Kota

Penuturan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
86

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN ? (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
Penurunan Beban Pencemaran Lingkungan	Pengelolaan Kualitas air dan Kawasan gambut	Penyajiapan penerapan kelas air di tingkat kabupaten/ kota untuk 13 sungai-sungai prioritas dari 119 kab/kota, yang terkoordinasi lintas K/L dan daerah	Tercapainya penyajiapan penerapan kelas air untuk 4 sungai prioritas yang terkoordinasi lintas K/L dan daerah	Kementerian Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota
	Pengendalian pencemaran air dan udara	Penglesaian pemertuan keamanan hidrologi gambut di 8 provinsi yang terkoordinasi dengan K/L terkait	Tersusunnya peta kesatuan hidrologis gambut Palau Sumatera	Kementerian Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota
		Memurunya beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketetapan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di pada kegiatan industri dan jasa	Tercapainya penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketetapan pengendalian pencemaran oleh 910 industri dan jasa	Kementerian Lingkungan Hidup	

Penyusunan ...

107



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
87

PROGRAM	TINDAKAN	KELIHARAN ?	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyusunan peta kerentanan perubahan iklim sampai ke tingkat regional	Penyusunan daftar kriteria baku kerusakan LH akibat perubahan iklim	Tersusunnya daftar kriteria baku kerusakan lingkungan hidup akibat perubahan iklim	Kementerian Lingkungan Hidup	
		Tersusunnya basis data lahan kritis ( <i>degraded land</i> )	Tersusunnya basis data lahan kritis ( <i>degraded land</i> )	Kementerian Lingkungan Hidup	
Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana Alam	Pemutakhiran sistem peringatan dini terhadap gempa bumi dan tsunami	Beroperasinya Ina-TREWS secara penuh berikut sistem pemantauan dan analisis data kegemparan	Tersedianya sistem pemantauan Ina-TREWS yang terintegrasi ke ruang Situasi Bina Gempa dan ALIA Center, serta Ina-TREWS beroperasi 100%	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)	

Peningkatan ...

10/7



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 88 \*

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN *) (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PISYEBIRTAH/DIARBAI (6)
Peningkatan Kemampuan Penanggulangan Bencana	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat	Meningkatnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terselenggaranya Diklat PB, diklat fungsional dan diklat teknis lainnya secara profesional	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPP)	
	Penyediaan sarana dan prasarana pada daerah yang sering sejadi kebakaran hutan	Identifikasi dan tersalurkannya sarana- prasarana pemadam kebakaran di daerah potensial kebakaran hutan	Tersalurkannya sarana- prasarana pemadam kebakaran hutan di setiap provinsi rasakan kebakaran hutan.	Kementerian Kehutanan	

Peningkatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
\* 89 \*

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN *) (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMERINTAH DAERAH (6)
	Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Mengembangkan kegiatan dengan cara melakukan training baik masyarakat dan aparatur, terhadap semua jenis bencana yang teridentifikasi rawan di semua daerah rawan bencana di Indonesia	Terlaksananya upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan aparatur dengan melakukan peningkatan kapasitas PB melalui simulasi, Gladi SSC-PB, Gladi ANP-Direx, Gladi Tsunami, Gladi Banjir longsor dan lain-lain	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Pemerintah Daerah terkait
	Pembinaan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	Pembinaan terhadap masyarakat dalam menghadapi bencana	Terselenggaranya sosialisasi PB di tingkat provinsi dan kabupaten/pemkotabekda	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Pemerintah Daerah terkait

Penyajian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 90 -

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN <sup>3</sup> (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PANGKALAN DATA (6)
	Terselenggara peralatan dan logistik dikawasan rawan bencana	Identifikasi jumlah dan jenis logistik yang dibutuhkan setiap daerah untuk peralatan menghadapi bencana dan transportasi untuk logistik; Terselenggara peralatan dan logistik yang memadai dikawasan rawan bencana	Terselenggara daftar jumlah dan jenis logistik yang dibutuhkan untuk setiap daerah rawan bencana dan rencana supply barang yang disiapkan dengan seluruh kabupaten rawan bencana; peralatan dan logistik siap pakai telah berada di daerah bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Pemerintah Daerah terkait
	Pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk pengurangan risiko dan mitigasi bencana alami	Terselenggara data spasial dan statistik kebencanaan, sistem informasi dan komunikasi di bidang kebencanaan untuk pengurangan risiko dan mitigasi	Terselenggara data dan informasi kebencanaan, peralatan teknologi informasi dan komunikasi, serta peningkatan kemitraan untuk pengurangan risiko dan mitigasi	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Pemerintah Daerah terkait

Standarisasi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 91 -

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELIRAKAN <sup>9</sup> (3)	SASARAN (4)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5)	PEMBINTA/DALIRAH (6)
Standarisasi Penilaian Lingkungan dan Rupa Bumi	Penyusunan standar dan pembuatan peta tutupan lahan	Adanya standar dan pembuatan peta tutupan lahan	1) Terbitnya SNI penutupan lahan 2) Peta tutupan lahan skala 1:250.000 selayah Sumatera dan Kalimantan	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)	
		Jumlah fundamental dataset rupa bumi dan tematik yang dapat dituangkan dalam SSNI	1) Tersedianya 10 fundamental dataset (FDS) rupabumi dan tematik 2) Beroperasinya fundamental dataset di Bakosurtanal	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)	

PRIORITAS 10 ...